

KONFLIK MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN WISATA EDUKASI DAN RELIGI JABAL RAHMAH

Resi Mahalalita¹, Abdul Latif², Zulkarnain³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Hamzanwadi

Email: resimahalalita56@gmail.com; abdullatif@hamzanwadi.ac.id;
hzulkarnainm@hamzanwadi.ac.id

Artikel histori:

Submit: 15-01-2023

Revisi: 08-03-2023

Diterima: 20-05-2023

Terbit: 30-06-2023

Kata Kunci:

social conflict,
educational tourism,
religious tourism,
local community,
Jabal Rahmah

Korespondensi:

hzulkarnainm@hamzanwadi.ac.id

Abstrak: This study examines the dynamics and forms of community conflict toward the existence of Jabal Rahmah Educational and Religious Tourism in Jango Village, Janapria District, Central Lombok. The study used a qualitative descriptive approach. Data were collected through direct observation, structured interviews, and documentation involving tourism managers, Pokdarwis members, community leaders, and residents who expressed objections to the tourism development. Data validity was strengthened through persistent observation, source triangulation, and reference adequacy, while analysis followed the stages of data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that community resistance emerged from several interconnected issues: the perceived similarity of the Kaaba replica and Jabal Rahmah symbols to sacred objects in Mecca, limited initial socialization, circulation of unclear information concerning land acquisition, concerns about the arrival and behavior of outside visitors, anxiety that youth activities could shift the religious character of the site, and weak communication between village government and tourism managers. Conflict appeared in both open and covert forms. Open conflict included the destruction of decorative photographs and uprooting of date-palm plants, while covert conflict took the form of direct complaints, social-media expressions, rumors, and informal discussions in public spaces. The study concludes that conflict around Jabal Rahmah is not simply a rejection of tourism but a contestation over meaning, information, interests, authority, and the distribution of participation in local tourism development. Strengthening transparent communication, participatory planning, cultural sensitivity, and multi-stakeholder collaboration is therefore essential for sustainable tourism governance.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pariwisata pada tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan perpindahan wisatawan dan kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan perubahan ruang sosial, simbol budaya, relasi kekuasaan, dan cara masyarakat memaknai wilayah tempat tinggalnya. Kehadiran sebuah destinasi dapat membuka peluang ekonomi, memperluas akses terhadap fasilitas, dan memperkenalkan identitas lokal, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan kekhawatiran tentang perubahan lingkungan sosial, komersialisasi simbol, perubahan tata ruang, serta berkurangnya kontrol masyarakat atas keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Karena itu, pembangunan pariwisata pada dasarnya merupakan proses sosial yang mempertemukan kepentingan pemerintah, pengelola, investor, masyarakat lokal, dan wisatawan. Ketika kepentingan tersebut tidak dikelola melalui komunikasi dan partisipasi yang memadai, perbedaan persepsi dapat berkembang menjadi ketegangan dan konflik (Curcija et al., 2019; Wang et al., 2021).

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Lombok. Penelitian Winengan (2019) mengenai perlawanan masyarakat lokal terhadap kebijakan pengembangan pariwisata di Lombok menunjukkan bahwa resistensi dapat muncul ketika masyarakat merasa kepentingannya tidak cukup dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Ketika keputusan pembangunan lebih banyak menekankan kepentingan ekonomi dan bisnis, sementara ruang masyarakat untuk menyampaikan kepentingan terbatas, legitimasi kebijakan dapat melemah dan respons penolakan menjadi lebih mungkin terjadi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa konflik pariwisata tidak selalu bersumber dari penolakan terhadap pariwisata itu sendiri, melainkan dapat muncul dari proses pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, akses informasi, dan sejauh mana masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan.

Fenomena yang serupa, dengan karakter yang lebih spesifik, ditemukan pada keberadaan Wisata Edukasi dan Religi Jabal Rahmah di Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Wisata ini dikembangkan sebagai kawasan yang memadukan edukasi religi, pelatihan manasik haji, simbol kebangsaan, kegiatan sosial, dan fasilitas rekreasi. Berdasarkan dokumen penelitian, pembangunan dimulai pada 10 November 2018 dan kawasan mulai dibuka untuk kegiatan pariwisata pada 10 November 2019. Konsep pengembangannya diarahkan pada pendidikan dan pelatihan berbasis religi serta kebangsaan, dengan pelibatan pengelola, masyarakat, dan pemerintah desa dalam berbagai kegiatan (Mahalalita, 2023).

Secara fisik, kawasan tersebut memiliki sejumlah simbol yang menjadi daya tarik sekaligus sumber perdebatan. Di bagian religi terdapat replika Ka'bah berukuran sekitar 7 × 7 meter dengan tinggi sekitar 7 meter, Tugu Arafah, Mina, Muzdalifah, Safa-Marwah, serta Tangga Asmaul Husna. Di bagian kebangsaan terdapat Aula Sumpah Pemuda, Gerbang Kemerdekaan, Jembatan Emas Proklamasi, dan Gerbang Bhinneka Tunggal Ika. Fasilitas pendukung meliputi pusat informasi, mushala, gazebo, toilet, lahan parkir, kolam renang, dan bus mini. Kelengkapan tersebut memperlihatkan bahwa Jabal Rahmah dirancang bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi sebagai ruang pendidikan yang

menggabungkan simbol agama, kebangsaan, dan kegiatan wisata (Mahalalita, 2023).

Namun, keberadaan simbol dan konsep tersebut tidak diterima secara seragam oleh masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan kemiripan replika Ka'bah dengan bentuk aslinya di Mekkah dan mengkhawatirkan berkurangnya kesakralan simbol tersebut. Sebagian lainnya mengaitkan pembangunan replika dengan musim kemarau yang terjadi pada saat pembangunan, sedangkan pihak pengelola menjelaskan bahwa kemarau panjang telah diinformasikan oleh BMKG. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi dan akses informasi pada tahap awal membuat penjelasan yang sebenarnya tidak selalu sampai kepada masyarakat secara memadai (Mahalalita, 2023).

Selain persoalan simbol keagamaan, masyarakat juga menerima informasi yang belum terverifikasi mengenai kemungkinan penggusuran permukiman, kedatangan wisatawan asing, dan potensi perubahan adat serta budaya. Kekhawatiran lain berkaitan dengan aktivitas anak muda, seperti kegiatan camping dan berkumpul, yang dipandang oleh sebagian warga berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan citra wisata religi. Dengan demikian, konflik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap objek wisata. Konflik berkembang melalui proses pembentukan persepsi, pertukaran informasi, kekhawatiran atas perubahan sosial, serta perbedaan kepentingan antaraktor.

Literatur pariwisata menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dampak pariwisata berpengaruh terhadap dukungan mereka terhadap pembangunan. Wang et al. (2021) menemukan bahwa persepsi konflik dalam komunitas menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan partisipasi masyarakat dengan dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Ketika masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat dan menyampaikan kepentingannya, potensi konflik dapat dikelola lebih baik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat memperkuat persepsi bahwa pembangunan merupakan proses yang datang dari luar komunitas. Temuan Putra (2020) di Desa Wisata Carangsari juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat bersifat semu dan pasif apabila proses pengembangan lebih bercorak top-down.

Konflik dalam pembangunan pariwisata juga memiliki dimensi kekuasaan. Curcija et al. (2019) menunjukkan bahwa konflik dalam community-based tourism dapat berkembang melalui rangkaian peristiwa, respons, dan dampak yang saling berhubungan. Konflik baru dapat muncul ketika respons terhadap konflik sebelumnya tidak menyelesaikan akar persoalan. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan setelah konflik terbuka terjadi, tetapi harus diarahkan pada pengelolaan komunikasi, kepentingan, dan mekanisme partisipasi sejak tahap perencanaan. Dalam konteks Lombok, Winengan (2019) memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata juga berkaitan dengan persoalan representasi kepentingan dan distribusi kekuasaan.

Penelitian mengenai Jabal Rahmah penting dilakukan karena objek ini memiliki karakter yang berbeda dari destinasi wisata alam maupun desa wisata pada umumnya. Jabal Rahmah menggabungkan simbol religi dan kebangsaan dalam satu ruang wisata yang berada di tengah masyarakat dengan norma sosial dan keagamaan yang kuat. Karena itu, respons masyarakat terhadap pembangunan tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi atau perubahan ruang, tetapi juga dengan persoalan kesakralan simbol, identitas sosial, otoritas pengelolaan, dan

batas perilaku yang dianggap pantas di ruang wisata. Pada titik ini, konflik dapat dipahami sebagai proses sosial ketika aktor-aktor yang berbeda berusaha mempertahankan kepentingan, nilai, dan definisi mereka terhadap objek yang sama.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pertanyaan: (1) bagaimana dinamika masyarakat dalam melakukan konflik terhadap keberadaan Wisata Edukasi dan Religi Jabal Rahmah di Desa Jango; dan (2) bagaimana bentuk konflik masyarakat terhadap keberadaan wisata tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan sumber dan dinamika penolakan serta mengidentifikasi bentuk konflik yang muncul. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi pariwisata dengan menempatkan konflik sebagai proses yang dibentuk oleh interaksi antara simbol, informasi, kepentingan, otoritas, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola wisata dan pemerintah desa dalam membangun tata kelola destinasi yang lebih komunikatif, partisipatif, dan sensitif terhadap nilai lokal.

KAJIAN LITERATUR

Konflik sosial merupakan bagian yang inheren dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat tersusun atas aktor dan kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, sumber daya, serta posisi yang tidak selalu sama. Dalam perspektif Dahrendorf, konflik berkaitan dengan distribusi otoritas yang tidak merata dalam struktur sosial. Mereka yang memiliki otoritas memiliki kapasitas lebih besar untuk menentukan aturan, sedangkan kelompok yang berada pada posisi subordinat dapat mengembangkan kepentingan yang berlawanan. Konflik dengan demikian bukan semata-mata gangguan terhadap keteraturan, tetapi juga dapat menjadi mekanisme yang memperlihatkan ketegangan kepentingan dalam struktur sosial (Dahrendorf, 1959).

Dalam konteks pembangunan pariwisata, perspektif konflik membantu menjelaskan mengapa suatu destinasi yang secara ekonomi dipandang positif dapat sekaligus dipersepsi negatif oleh sebagian warga. Pengelola dan pemerintah dapat melihat destinasi sebagai instrumen peningkatan ekonomi, promosi daerah, dan pendidikan, sedangkan masyarakat mungkin memandangnya dari sudut perlindungan ruang hidup, adat, kesakralan simbol, keamanan sosial, atau akses terhadap keputusan. Perbedaan definisi mengenai apa yang dianggap sebagai manfaat dan risiko dapat melahirkan konflik kepentingan. Curcija et al. (2019) menegaskan bahwa konflik dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat muncul melalui berbagai tema dan tidak selalu bergerak secara linear.

Konsep partisipasi masyarakat menjadi penting dalam membaca persoalan tersebut. Partisipasi bukan sekadar kehadiran warga dalam kegiatan, tetapi juga mencakup kesempatan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, terlibat dalam perencanaan, memengaruhi keputusan, dan memperoleh manfaat pembangunan. Putra (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat berada pada tingkat konsultasi yang semu dan pasif ketika masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap proses perencanaan. Kondisi semacam itu dapat membuat pembangunan terlihat partisipatif secara administratif, tetapi belum tentu memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Penelitian Setiyorini et al. (2019) memperlihatkan bahwa persepsi terhadap konsekuensi negatif, keterikatan pada tempat, dukungan pemerintah, dan kolaborasi masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan partisipasi dalam pembangunan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga dipengaruhi oleh bagaimana mereka menilai perubahan yang terjadi pada ruang sosialnya. Jika masyarakat merasa tempat yang mereka miliki secara sosial terancam, persepsi negatif dapat menjadi dasar penolakan. Sebaliknya, jika masyarakat merasa memiliki ruang untuk bernegosiasi dan memperoleh manfaat, dukungan terhadap pembangunan cenderung lebih mungkin terbentuk.

Partisipasi juga berkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan wisata. Wang et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan dengan dukungan warga terhadap pembangunan pariwisata dan bahwa persepsi konflik dalam komunitas menjadi salah satu mekanisme penting dalam hubungan tersebut. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa konflik bukan hanya akibat perbedaan kepentingan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas proses interaksi antara masyarakat dan aktor pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan partisipasi dan konflik semakin kompleks karena pariwisata sering bersinggungan dengan tanah, adat, identitas, dan kebijakan pemerintah. Winengan (2019) menunjukkan bahwa resistensi masyarakat lokal di Lombok terhadap kebijakan pengembangan pariwisata berhubungan dengan lemahnya pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat dalam proses kebijakan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan Jabal Rahmah, terutama dalam melihat bagaimana komunikasi, transparansi, dan ruang artikulasi kepentingan dapat menentukan penerimaan masyarakat terhadap sebuah destinasi.

Literatur juga memperlihatkan bahwa dampak pariwisata tidak hanya bersifat ekonomi. Studi tentang pengembangan pariwisata di pulau kecil Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakui manfaat ekonomi sekaligus merasakan penurunan kohesi sosial dan perubahan terhadap kepatuhan pada adat tradisional (Prayag et al., 2018). Artinya, persepsi terhadap pariwisata bersifat ambivalen: satu objek dapat dinilai memberikan manfaat pada satu dimensi tetapi menimbulkan risiko pada dimensi lainnya.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif konflik sebagai kerangka utama untuk membaca Jabal Rahmah. Perspektif tersebut dipadukan dengan konsep partisipasi masyarakat dan tata kelola pariwisata. Kerangka analitisnya menempatkan konflik sebagai hasil interaksi empat unsur: (1) perbedaan kepentingan dan otoritas; (2) produksi dan distribusi informasi; (3) persepsi masyarakat terhadap perubahan sosial-budaya; dan (4) kualitas partisipasi serta komunikasi antarpemangku kepentingan. Kerangka ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk penolakan, tetapi juga menjelaskan mengapa penolakan berkembang dan bagaimana konflik tersebut diekspresikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, alasan, dan bentuk tindakan masyarakat dalam merespons keberadaan Wisata Edukasi dan Religi Jabal Rahmah. Pendekatan kualitatif memungkinkan fenomena konflik dibaca dalam konteks sosialnya, termasuk makna yang diberikan aktor terhadap simbol wisata, informasi yang beredar, kepentingan yang

dipertentangkan, serta hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola wisata.

Penelitian dilaksanakan di Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi dipilih karena di desa tersebut terdapat Jabal Rahmah, sebuah kawasan wisata buatan yang memadukan konsep edukasi religi dan kebangsaan dan pada tahap perkembangannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dokumen penelitian mencatat bahwa Desa Jango memiliki 16 dusun dan pada profil desa tahun 2023 tercatat 4.031 penduduk, terdiri atas 1.996 laki-laki dan 2.035 perempuan. Masyarakat desa juga memiliki kehidupan keagamaan yang kuat serta masih mempertahankan adat dan kearifan lokal dalam berbagai kegiatan sosial (Mahalalita, 2023).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap objek penelitian. Informan mencakup unsur pengelola/Pokdarwis, antara lain pemilik atau penanggung jawab wisata, ketua Pokdarwis, manajer umum, dan unsur pendukung pengelolaan; serta tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui atau mengalami langsung dinamika penolakan. Daftar narasumber dalam skripsi berjumlah 17 orang dengan rentang usia 25-65 tahun. Dalam artikel ini, identitas informan tidak dijadikan fokus analisis; yang diprioritaskan adalah posisi sosial, pengalaman, dan keterangan mereka mengenai konflik (Mahalalita, 2023).

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi kawasan wisata, fasilitas, aktivitas pengelola, dan situasi sosial yang berkaitan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan yang mencakup pandangan terhadap wisata, manfaat dan dampak keberadaan wisata, bentuk penolakan, dinamika konflik, hambatan pengembangan, serta kerja sama dengan pihak lain. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi berupa foto, catatan, dokumen profil desa, dan bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Keabsahan data diperkuat melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, dan kecukupan referensi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki posisi berbeda terhadap Jabal Rahmah. Perbandingan tersebut penting karena konflik merupakan fenomena yang memiliki lebih dari satu perspektif. Pernyataan pengelola mengenai tujuan pembangunan, misalnya, dibandingkan dengan persepsi masyarakat mengenai simbol, informasi, dan dampak sosial yang mereka rasakan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data wawancara dikelompokkan ke dalam tema yang berhubungan dengan sumber konflik, seperti simbol keagamaan, informasi tidak jelas, kekhawatiran terhadap orang luar, aktivitas anak muda, dan perbedaan kepentingan. Data kemudian disajikan secara tematik untuk melihat hubungan antarisu dan bentuk konflik. Kesimpulan ditarik setelah pola yang muncul dibandingkan secara terus-menerus dengan data lapangan. Prosedur tersebut sejalan dengan tradisi analisis kualitatif Miles et al. (2014).

Tabel 1. Kelompok Informan dan Fokus Informasi

Kelompok informan	Posisi/keterlibatan	Fokus informasi
Pengelola/Pokdarwis	Owner, ketua Pokdarwis, manajer dan unsur pengelola	Tujuan pembangunan, konsep wisata, hambatan, respons terhadap penolakan
Tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui perkembangan wisata	Persepsi masyarakat, informasi yang beredar, kepentingan dan komunikasi
Warga yang menolak/keberatan	Warga dari beberapa dusun di Desa Jango	Alasan penolakan, bentuk protes, kekhawatiran sosial-budaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jabal Rahmah dibangun sebagai wisata buatan yang menggabungkan dimensi edukasi religi dan kebangsaan. Dalam rancangan pengelola, kawasan ini diharapkan menjadi ruang pelatihan manasik haji, pendidikan nilai kebangsaan, kegiatan sosial, kewirausahaan, seni dan budaya, serta rekreasi. Struktur pengelola melibatkan manajemen umum, pemasaran, UMKM, sarana-prasarana, keamanan, sosial masyarakat, dan support system Rumah Kebangsaan Pancasila. Kehadiran Pokdarwis dan unsur masyarakat dalam struktur pengelolaan menunjukkan adanya upaya untuk membangun keterhubungan dengan komunitas lokal (Mahalalita, 2023).

Pada sisi lain, Jabal Rahmah berada dalam ruang sosial yang telah memiliki sistem nilai, adat, relasi kelembagaan, dan orientasi keagamaan sendiri. Karena itu, pembangunan destinasi tidak berlangsung dalam ruang kosong. Setiap simbol, aktivitas, dan aktor baru harus dinegosiasikan dengan pemaknaan yang telah berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa objek yang dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dapat dipahami berbeda oleh warga. Dalam kajian pariwisata, konflik semacam ini menunjukkan bahwa destinasi merupakan ruang kontestasi makna dan kepentingan, bukan sekadar ruang konsumsi wisata (Curcija et al., 2019; Wang et al., 2021).

1. Replika Ka'bah sebagai Sumber Kontestasi Makna

Temuan paling menonjol adalah munculnya penolakan terhadap replika Ka'bah. Sebagian warga memandang bentuk replika yang sangat menyerupai Ka'bah di Mekkah sebagai sesuatu yang problematik karena menyangkut simbol yang dianggap sakral. Bagi pengelola, kemiripan tersebut justru dimaksudkan agar peserta pelatihan memperoleh gambaran yang konkret ketika melakukan praktik tawaf dan rangkaian manasik. Dengan demikian, terdapat dua kerangka pemaknaan yang berbeda: pengelola melihat replika sebagai media pedagogis, sedangkan sebagian masyarakat melihatnya melalui lensa kesakralan dan otentisitas simbol.

Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak selalu bermula dari benturan kepentingan material. Konflik dapat tumbuh dari perbedaan definisi terhadap objek yang sama. Simbol yang oleh satu aktor dianggap sebagai

alat pendidikan dapat oleh aktor lain dipersepsi sebagai bentuk yang berpotensi mengurangi kesakralan. Dalam perspektif konflik, perbedaan definisi tersebut penting karena aktor berusaha mempertahankan interpretasi yang mereka anggap sah. Ketika komunikasi awal tidak cukup menjelaskan tujuan, batas penggunaan, dan makna simbol, ruang interpretasi informal menjadi semakin besar.

Data wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian warga menghubungkan kemunculan replika Ka'bah dengan musim kemarau panjang. Pengelola menjelaskan bahwa pada saat itu telah terdapat informasi BMKG mengenai kemarau panjang, tetapi sebagian masyarakat tidak memperoleh atau tidak mempercayai informasi tersebut. Di sini terlihat bahwa konflik dibentuk bukan hanya oleh fakta material, tetapi juga oleh proses produksi pengetahuan di tingkat lokal. Informasi yang tidak segera diklarifikasi dapat bertransformasi menjadi rumor dan kemudian menjadi dasar sikap.

Temuan ini sejalan dengan Winengan (2019), yang menunjukkan bahwa persoalan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pariwisata dapat memengaruhi legitimasi pembangunan. Dalam kasus Jabal Rahmah, kekurangan sosialisasi awal menciptakan jarak antara maksud pengelola dan pemaknaan masyarakat. Jarak tersebut kemudian diisi oleh penafsiran informal. Karena itu, komunikasi bukan sekadar aktivitas pendukung pembangunan, tetapi bagian dari mekanisme pembentukan legitimasi sosial.

2. Informasi Tidak Jelas dan Produksi Rumor

Konflik berikutnya berkaitan dengan beredarnya informasi yang tidak jelas mengenai pengusuran permukiman atau lahan masyarakat. Beberapa informan mengaku menolak karena memperoleh informasi bahwa tempat tinggal mereka akan digusur. Bagi masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah dan tempat tinggal, informasi tersebut menyentuh kepentingan yang sangat mendasar. Bahkan ketika informasi tersebut belum terbukti, potensi kehilangan ruang hidup sudah cukup untuk membentuk sikap defensif.

Proses penyebaran informasi berlangsung melalui percakapan antarwarga, pasar, dan media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang publik informal berperan penting dalam pembentukan opini tentang destinasi. Informasi yang tidak terverifikasi dapat mengalami penguatan ketika terus diulang. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak selalu membedakan antara informasi resmi, dugaan, pengalaman pribadi, dan rumor. Ketika informasi resmi dari pengelola atau pemerintah tidak hadir secara cepat dan mudah diakses, rumor memperoleh ruang untuk membentuk persepsi.

Dalam konteks pengembangan destinasi, persoalan informasi memiliki konsekuensi terhadap kepercayaan. Masyarakat yang merasa tidak memperoleh informasi dari sumber resmi dapat menafsirkan ketertutupan sebagai tanda bahwa terdapat sesuatu yang disembunyikan. Karena itu, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola konflik. Temuan Putra (2020) tentang lemahnya partisipasi pada tahap perencanaan memperlihatkan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat sejak awal, bukan hanya ketika destinasi telah dibangun.

Jika dilihat melalui teori konflik, penyebaran rumor juga dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi kepentingan dari kelompok yang merasa memiliki akses terbatas terhadap otoritas formal. Masyarakat tidak selalu memiliki saluran resmi untuk memengaruhi keputusan pembangunan, sehingga percakapan informal menjadi salah satu arena untuk membangun dukungan, mengekspresikan

ketidaksetujuan, dan menguji informasi. Oleh sebab itu, penyebaran rumor perlu dibaca sebagai gejala adanya kesenjangan komunikasi dan legitimasi, bukan hanya sebagai kesalahan individual warga.

3. Kekhawatiran terhadap Wisatawan Luar dan Perubahan Budaya

Sebagian warga juga mengkhawatirkan kedatangan orang luar, termasuk wisatawan asing. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata terkait jumlah wisatawan, tetapi menyangkut kemungkinan perubahan norma, adat, dan budaya lokal. Bagi masyarakat yang memiliki identitas keagamaan dan adat yang kuat, perubahan pola interaksi di ruang publik dapat dipandang sebagai risiko terhadap tatanan sosial yang telah berlangsung lama.

Studi Prayag et al. (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus dipersepsi menurunkan kohesi sosial dan kepatuhan terhadap adat tradisional. Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa masyarakat dapat bersikap ambivalen terhadap pariwisata. Warga dapat mengakui manfaat fasilitas atau ekonomi, tetapi tetap merasa perlu membatasi dampak sosial-budaya. Dalam kasus Jabal Rahmah, kekhawatiran tersebut semakin kuat karena wisata menggunakan simbol religi sebagai bagian utama dari identitas destinasi.

Persepsi terhadap perilaku pengunjung di sekitar replika Ka'bah juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi normatif mengenai pakaian dan cara menggunakan ruang. Sebagian warga menganggap bahwa pengunjung seharusnya berpakaian sopan ketika berada di sekitar simbol keagamaan. Ketika aturan tersebut belum dijelaskan secara tegas oleh pengelola, perilaku pengunjung dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma lokal. Dengan demikian, pengelolaan destinasi perlu memperhitungkan bahwa standar perilaku wisatawan tidak hanya ditentukan oleh pengelola, tetapi juga oleh norma sosial masyarakat sekitar.

4. Aktivitas Anak Muda dan Kekhawatiran terhadap Pergeseran Fungsi Wisata

Keberadaan kegiatan camping dan berkumpulnya anak muda menjadi isu lain yang memunculkan keberatan. Sebagian warga khawatir ruang wisata akan digunakan untuk aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan karakter edukasi dan religi, seperti keramaian, karaoke, atau perilaku konsumsi alkohol. Kekhawatiran tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi mengenai fungsi ruang: apakah Jabal Rahmah terutama dipahami sebagai ruang pendidikan religi, ruang rekreasi keluarga, atau ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas.

Perbedaan tersebut penting karena sebuah destinasi wisata selalu mempunyai lebih dari satu fungsi. Pengelola cenderung perlu memperluas jenis kegiatan untuk menarik pengunjung dan menjaga keberlanjutan ekonomi, sementara masyarakat dapat menghendaki pembatasan aktivitas tertentu untuk mempertahankan karakter tempat. Jika batas-batas fungsi tidak disepakati, aktivitas yang bagi pengelola dianggap normal dapat dipandang masyarakat sebagai penyimpangan dari identitas wisata.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa konflik Jabal Rahmah merupakan konflik mengenai makna dan tata kelola ruang. Solusinya bukan sekadar melarang atau mengizinkan kegiatan, melainkan menyusun aturan penggunaan ruang secara partisipatif: jenis kegiatan yang diperbolehkan, waktu pelaksanaan, standar perilaku pengunjung, mekanisme pengawasan, dan prosedur pengaduan. Dengan

cara tersebut, perbedaan kepentingan dapat dipindahkan dari arena rumor menuju arena negosiasi yang lebih terbuka.

5. Perbedaan Kepentingan antara Pemerintah Desa, Pengelola, dan Kelompok Masyarakat

Dimensi konflik yang paling struktural terlihat pada perbedaan kepentingan antaraktor. Data lapangan menunjukkan adanya persepsi bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan pengelola wisata belum optimal. Beberapa informan juga mengaitkan ketegangan dengan perbedaan orientasi kelembagaan dan afiliasi kelompok. Ketika kegiatan wisata dipersepsi lebih dekat dengan kepentingan satu kelompok, kelompok lain dapat merasa tersisihkan. Dalam kondisi seperti itu, objek wisata menjadi arena tempat identitas dan kepentingan kelompok dinegosiasikan.

Dalam perspektif Dahrendorf (1959), posisi yang memiliki otoritas memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi keputusan. Pada Jabal Rahmah, pengelola memiliki otoritas operasional, pemerintah desa memiliki otoritas administratif dan politik lokal, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan atas ruang hidup dan legitimasi sosial. Konflik muncul ketika kewenangan formal tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan mengapa protes dapat tetap muncul meskipun pembangunan secara administratif telah berjalan.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Winengan (2019) mengenai resistensi masyarakat di Lombok terhadap kebijakan pariwisata. Resistensi menjadi lebih mungkin ketika masyarakat merasa bahwa proses pembangunan lebih banyak ditentukan oleh aktor yang mempunyai sumber daya dan kewenangan, sementara ruang artikulasi kepentingan lokal terbatas. Pada Jabal Rahmah, persoalan tersebut terlihat pada kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, pengelola, Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan kelompok warga.

Desain tata kelola yang lebih partisipatif diperlukan agar konflik tidak berhenti pada bentuk penolakan. Partisipasi warga seharusnya berlangsung sejak tahap penentuan konsep, penyusunan aturan, penetapan kegiatan, sampai evaluasi. Kajian tentang governance pariwisata menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk lokal merupakan unsur penting karena warga memiliki pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan destinasi yang tidak selalu dimiliki oleh aktor eksternal (Bichler, 2021).

Tabel 2. Dinamika Konflik yang Ditemukan di Jabal Rahmah

Dinamika	Pemicu utama	Persepsi masyarakat	Implikasi konflik
Simbol religi	Kemiripan replika Ka'bah	Kekhawatiran terhadap kesakralan	Penolakan dan protes
Informasi	Sosialisasi awal terbatas	Isu penggusuran dan kemarau	Rumor, desas-desus, komplain
Wisatawan luar	Kedatangan orang asing	Kekhawatiran perubahan adat/budaya	Sikap hati-hati dan keberatan
Aktivitas anak muda	Camping dan keramaian	Kekhawatiran perilaku menyimpang	Permintaan pembatasan kegiatan
Kepentingan aktor	Komunikasi dan kolaborasi lemah	Merasa tersisih/dirugikan	Protes dan resistensi

6. Bentuk Konflik: Terbuka dan Tertutup

Penelitian menemukan bahwa konflik masyarakat berlangsung dalam bentuk terbuka dan tertutup. Konflik terbuka tampak melalui tindakan fisik terhadap fasilitas atau elemen visual di kawasan wisata. Salah satu informan mengakui pernah mencabut tanaman kurma dan merusak foto yang dipasang di area wisata karena tidak menyetujui keberadaan Jabal Rahmah. Tindakan tersebut merupakan ekspresi penolakan yang secara langsung menyasar simbol material destinasi. Walaupun tidak berkembang menjadi kekerasan massa, tindakan tersebut menunjukkan bahwa konflik telah memasuki bentuk perilaku nyata.

Konflik tertutup atau terselubung lebih banyak ditemukan dalam bentuk komplain tatap muka, pembicaraan di pasar dan lingkungan sosial, isu yang beredar, serta ekspresi melalui media sosial. Salah satu pihak pengelola menyebut adanya beberapa warga yang melakukan komplain langsung, sementara isu tentang wisata juga beredar melalui WhatsApp, Facebook, dan percakapan masyarakat. Bentuk tertutup penting diperhatikan karena dapat berlangsung lama tanpa menghasilkan kejadian dramatis, tetapi tetap memengaruhi reputasi dan penerimaan sosial terhadap destinasi.

Curcija et al. (2019) menjelaskan bahwa konflik pariwisata dapat berkembang melalui rangkaian peristiwa, respons, dan dampak, serta memungkinkan munculnya konflik baru yang saling berkaitan. Pola tersebut terlihat pada Jabal Rahmah. Isu tentang replika Ka'bah, kemarau, penggusuran, wisatawan luar, dan aktivitas anak muda tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Masing-masing memperkuat persepsi bahwa wisata membawa perubahan yang belum cukup dikendalikan. Karena itu, pengelolaan konflik harus bersifat integratif, bukan menangani setiap isu secara terpisah.

Tabel 3. Bentuk Konflik dan Respons yang Diperlukan

Bentuk konflik	Bukti lapangan	Karakter	Respons tata kelola
Terbuka	Perusakan foto dan pencabutan tanaman	Langsung dan material	Mediasi, perlindungan fasilitas, klarifikasi
Tertutup	Komplain, isu, percakapan, media sosial	Tidak langsung dan berulang	Transparansi informasi dan kanal pengaduan
Persepsi simbolik	Keberatan terhadap replika Ka'bah	Berbasis nilai dan makna	Dialog tokoh agama/masyarakat
Konflik kepentingan	Perbedaan orientasi antarlembaga	Struktural	Forum multipihak dan pembagian peran
Kekhawatiran budaya	Wisatawan luar dan aktivitas muda	Antisipatif	Aturan perilaku dan pengawasan

7. Konflik sebagai Persoalan Legitimasi dan Tata Kelola

Jika seluruh temuan disintesis, konflik Jabal Rahmah dapat dipahami sebagai persoalan legitimasi sosial. Secara administratif dan organisatoris, wisata memiliki struktur pengelolaan dan tujuan yang jelas. Namun legitimasi sosial tidak otomatis muncul karena sebuah objek telah dibangun. Legitimasi membutuhkan penerimaan terhadap tujuan, proses, simbol, aturan, dan aktor yang mengelolanya. Ketika masyarakat mempertanyakan simbol, meragukan informasi, atau merasa tidak cukup dilibatkan, legitimasi dapat melemah.

Temuan Wang et al. (2021) memperlihatkan pentingnya persepsi konflik dalam hubungan antara partisipasi dan dukungan warga. Sementara itu, Bichler (2021) menekankan bahwa desain governance destinasi perlu memberi tempat yang lebih besar bagi penduduk lokal. Kedua perspektif tersebut membantu membaca Jabal Rahmah sebagai persoalan tata kelola, bukan semata-mata persoalan perilaku warga yang menolak.

Karena itu, strategi penyelesaian konflik perlu diarahkan pada beberapa langkah. Pertama, pengelola dan pemerintah desa perlu membangun mekanisme komunikasi rutin yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dari sumber resmi. Kedua, setiap pengembangan fasilitas atau kegiatan yang sensitif secara agama dan budaya perlu melalui konsultasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok warga. Ketiga, aturan penggunaan ruang, terutama pada kawasan simbol religi, perlu disusun secara terbuka dan dikomunikasikan kepada pengunjung. Keempat, forum multipihak perlu digunakan untuk membahas isu yang menyangkut pembagian manfaat, kegiatan kelembagaan, dan potensi perubahan sosial.

Kelima, masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai subjek dialog, bukan hanya objek sosialisasi. Partisipasi yang bermakna berarti pendapat warga dapat memengaruhi keputusan tertentu. Pengalaman Desa Wisata Carangsari menunjukkan bahwa partisipasi yang hanya bersifat konsultatif dan pasif belum cukup untuk menghasilkan rasa memiliki terhadap pembangunan (Putra, 2020). Dalam kasus Jabal Rahmah, penguatan rasa memiliki dapat dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan UMKM, kegiatan edukasi, pengawasan sosial, promosi, dan evaluasi destinasi.

Dengan demikian, konflik tidak harus selalu dipandang sebagai kegagalan pembangunan. Konflik dapat menjadi sumber informasi mengenai aspek pembangunan yang belum diterima, belum dipahami, atau belum dinegosiasikan secara memadai. Yang menjadi persoalan adalah ketika konflik tidak mempunyai saluran penyelesaian sehingga berkembang menjadi rumor, tindakan destruktif, atau polarisasi kelompok. Jika konflik dikelola sebagai proses dialog dan negosiasi, perbedaan kepentingan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola destinasi.

8. Sintesis Sosiologis: dari Penolakan menuju Negosiasi

Temuan penelitian memperlihatkan tiga lapisan konflik. Lapisan pertama adalah konflik makna, yaitu perbedaan pemaknaan terhadap replika Ka'bah, identitas religi, dan fungsi ruang wisata. Lapisan kedua adalah konflik informasi, yaitu ketegangan yang tumbuh dari keterbatasan sosialisasi dan beredarnya informasi yang tidak jelas. Lapisan ketiga adalah konflik kepentingan dan otoritas, yaitu perbedaan posisi antara pemerintah desa, pengelola, Pokdarwis, dan kelompok masyarakat. Ketiga lapisan tersebut saling memperkuat sehingga menghasilkan bentuk konflik terbuka maupun tertutup.

Model ini memperlihatkan bahwa akar konflik tidak berada pada satu faktor tunggal. Replika Ka'bah menjadi pemicu yang terlihat, tetapi respons masyarakat dipengaruhi oleh konteks informasi, pengalaman sosial, kekhawatiran budaya, dan hubungan antarlembaga. Karena itu, menyelesaikan satu isu secara teknis, misalnya dengan menjelaskan fungsi replika, belum tentu menghilangkan konflik apabila persoalan partisipasi dan kepercayaan belum ditangani.

Secara teoritis, temuan ini memperluas penggunaan perspektif konflik dalam kajian pariwisata lokal. Konflik tidak hanya dipahami sebagai pertentangan antara

masyarakat dan pengelola, tetapi sebagai relasi dinamis di antara beberapa aktor dengan sumber daya dan otoritas yang berbeda. Secara empiris, penelitian ini memperlihatkan bahwa destinasi yang membawa simbol agama memiliki sensitivitas tambahan karena perubahan ruang tidak hanya dibaca dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari perspektif moral dan kesakralan.

Implikasi praktisnya adalah perlunya model pengelolaan yang berbasis negosiasi. Pengelola perlu memosisikan masyarakat sebagai mitra yang memiliki pengetahuan lokal, sementara masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup untuk menilai pembangunan secara rasional. Pemerintah desa berfungsi sebagai mediator yang memastikan bahwa kepentingan pengelola dan masyarakat dapat dipertemukan. Pokdarwis dapat menjadi penghubung operasional, sedangkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu menerjemahkan isu sensitif ke dalam bahasa sosial yang dapat diterima komunitas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan bukti bahwa partisipasi dan kolaborasi merupakan komponen penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Setiyorini et al., 2019; Wang et al., 2021). Dengan demikian, keberhasilan Jabal Rahmah dalam jangka panjang tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari kemampuan destinasi membangun kepercayaan, mengelola perbedaan, melindungi nilai lokal, dan menciptakan manfaat yang dirasakan secara adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik masyarakat terhadap keberadaan Wisata Edukasi dan Religi Jabal Rahmah di Desa Jango terbentuk melalui interaksi antara perbedaan pemaknaan terhadap simbol religi, keterbatasan sosialisasi, penyebaran informasi yang belum jelas, kekhawatiran terhadap kedatangan wisatawan luar dan perubahan budaya, kekhawatiran terhadap aktivitas anak muda, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah desa, pengelola, dan kelompok masyarakat. Konflik tersebut tidak dapat dipahami sebagai penolakan tunggal terhadap pariwisata, melainkan sebagai proses sosial yang memperlihatkan adanya negosiasi mengenai makna, ruang, informasi, kepentingan, dan otoritas.

Konflik muncul dalam dua bentuk utama. Konflik terbuka diwujudkan melalui tindakan fisik seperti perusakan foto dan pencabutan tanaman di kawasan wisata. Konflik tertutup berlangsung melalui komplain langsung, percakapan informal, isu dan desas-desus, serta ekspresi penolakan melalui media sosial. Walaupun konflik tidak berkembang menjadi kekerasan massa, keberadaan kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial destinasi belum sepenuhnya terbentuk pada sebagian masyarakat.

Implikasi penelitian adalah perlunya penguatan tata kelola kolaboratif. Pemerintah desa dan pengelola perlu memperbaiki komunikasi dan transparansi informasi, membuka ruang partisipasi sejak tahap perencanaan, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembahasan isu sensitif, serta menetapkan aturan penggunaan ruang yang sesuai dengan karakter religi dan budaya lokal. Masyarakat juga perlu memperoleh kanal resmi untuk menyampaikan keberatan dan memverifikasi informasi. Dengan demikian, konflik dapat diarahkan dari bentuk penolakan menuju negosiasi yang konstruktif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu destinasi dan terutama menggambarkan dinamika berdasarkan pengalaman informan pada periode penelitian tahun 2023. Penelitian lanjutan dapat membandingkan Jabal Rahmah dengan destinasi religi lain di Lombok, mengkaji perubahan penerimaan masyarakat dari waktu ke waktu, serta menganalisis lebih jauh hubungan antara tata kelola, partisipasi, identitas keagamaan, dan keberlanjutan ekonomi destinasi.

REFERENSI

- Adikampana, I. M., Pujani, L. P. K., & Nugroho, S. (2018). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan pariwisata Candidasa. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1). <https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i01.p04>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100389.
- Curcija, M., Breakey, N., & Driml, S. (2019). Development of a conflict management model as a tool for improved project outcomes in community based tourism. *Tourism Management*, 70, 341-354. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.016>
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Mahalalita, R. (2023). *Konflik masyarakat terhadap keberadaan wisata edukasi dan religi Jabal Rahmah Desa Jango Kecamatan Janapria Lombok Tengah* [Skripsi, Universitas Hamzanwadi].
- Prayag, G., Hosany, S., Nunkoo, R., & Alders, T. (2018). Residents' perceptions of tourism impacts and community support for tourism development: Evidence from Mauritius. *Journal of Travel Research*, 57(5), 684-699.
- Putra, D. P. B. P. (2020). Pengembangan desa wisata Carangsari dan partisipasi masyarakat lokal. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 1-15. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.838>
- Setiyorini, H. P. D., Andari, R., & Masunah, J. (2019). Analysing factors for community participation in tourism development. *Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/thej.v9i1.16988>
- Silaban, A. H., & Bhaskara, G. I. (2020). Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok di Kota Bandung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 74-81. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p10>
- Wang, M., Jiang, J., Xu, S., & Guo, Y. (2021). Community participation and residents' support for tourism development in ancient villages: The mediating role of perceptions of conflicts in the tourism community. *Sustainability*, 13(5), 2455. <https://doi.org/10.3390/su13052455>
- Winengan. (2019). Local community resistance in Lombok against tourism development policy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(1), 69-79. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32i12019.69-79>
- World Tourism Organization. (2018). *Tourism and culture synergies*. UNWTO.